

RENTE EKONOMI PERDAGANGAN SATWA LIAR DAN TERPINGGIRKANNYA KESEJAHTERAAN HEWAN

Abstract

The state has made various efforts to protect the lives of wild animals from the risk of illegal trade. Various regulations starting from the CITES convention have been ratified and followed up with various other regulations. Although, a series of efforts have been made to protect wild animals from extinction, but animal trade continues. This study explores how the commodification of wild animals carried out by the state since its habitat causes the life of animals threatened. This research is a desk study conducted by tracking secondary data from environmental organization monitoring reports, government reports, journal articles, online media related to the topic being studied. The results of the study show that the forest territorial initiation process carried out by the state through species control, unilateral determination of forest area boundaries and formal control through various institutions and regulations actually causes wild animals and their habitats to be threatened by economic exploitation efforts. Residents around the territorial forest that were affected by territoriality were forced to become hunters to make a living. The state apparatus also cannot be separated in taking advantage of opportunities to be involved in hunting wild animals. Illegal hunting is a supplier for the trade in wild animals involving various modes of sale. The lives of wild animals have truly been threatened by making them commodities. The food chain has changed by making economic rents the main predator for wildlife.

Program Studi Ekonomi Pembangunan

FEB Unsyiah

Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111

Telp/Fax: (0651) 7551265

Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

©2019 FEB Unsyiah. All rights reserved.

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Alumnus Departemen Politik dan
Pemerintahan, FISIPOL,
Universitas Gajah Mada

E-mail: anggalih.bayu@yahoo.co.id

Keywords:

Animal Trade, Economic Rent, Wild
Animal Life

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 15 April 2020

Diterima setelah revisi: 27 Mei 2020

Diterima: Mei 2020

Dipublikasi: Mei 2020

1. Pendahuluan

Tulisan ini akan mendalami terkait gangguan *animal welfare* yang terjadi akibat perdagangan satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan tidak hanya akan dimaknai mengganggu ekosistem serta ketersediaan jumlah populasinya di alam, tetapi gangguan yang muncul dalam perdagangan hewan tersebut telah menjadikan mereka semata sebagai komoditas.

Kajian ini akan melihat bagaimana langkah pemerintah Indonesia yang diklaim sebagai “pelestarian alam” lewat pengaturan kuota perdagangan satwa dan pengawetan flora dan fauna tak lebih dari upaya memposisikan hewan liar sebagai komoditas pula, sehingga tak ada jaminan bagi peri kehidupannya. Upaya negara untuk memposisikan habitat dan hewan liar sebagai komoditas sampai dengan proses perdagangan hewan liar terutama yang dilakukan secara ilegal merupakan muara dari sengkabut persoalan komodifikasi. Gangguan terhadap *animal welfare* tidak hanya menyoal perlakuan manusia terhadap hewan, tetapi lebih jauh dari terpinggirkannya hak hidup satwa liar secara naluriah yang diganggu oleh proses komodifikasi ruang hidup, sehingga ikut pula memicu perdagangan binatang secara ilegal.

Indonesia sendiri telah mencoba melindungi keberadaan satwa liar dan mencegah perdagangannya secara ilegal dengan melakukan beberapa cara. Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, pada tanggal 15 Desember 1978 yang mengatur perlindungan dan perdagangan satwa dengan melakukan penggolongan satwa yang “terancam punah” (Hanif, 2015). Di tingkat nasional, negara membuat UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia (Hanif, 2015).

Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang di izinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Hanif, 2015). Perlindungan dan pengaturan perdagangan hewan dalam CITES mendorong negara anggota untuk membentuk otoritas manajemen dan otoritas keilmuan. Otoritas manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema ekspor dan impor satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, Otoritas Keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan (Hanif, 2015).

Di Indonesia, otoritas manajemen berada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK). Sedangkan, otoritas keilmuan dijabat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah Indonesia melakukan proses “pengawetan” keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya. Pemerintah melakukan usaha “pengawetan” baik di dalam maupun di luar habitat dari satwa. Meskipun, kajian dari menunjukkan ada perbedaan pengaturan dalam ketentuan regulasi nasional dan internasional. Salah satunya tentang pembagian penggolongan ke dalam 2 status: dilindungi dan tidak dilindungi ini berbeda dengan konvensi CITES. Regulasi nasional juga tidak mengatur perdagangan satwa yang tidak ada dalam negeri yang masuk ke Indonesia (Hanif, 2015).

Indonesia juga terlibat dalam *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN WEN) merupakan jaringan yang beranggotakan lembaga-lembaga di negara ASEAN yang menangani penegakan hukum *wildlife crime*, yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan *CITES Management Authority*. Kerjasama melalui ASEAN WEN menjadi skema pula dalam pengaturan perdagangan satwa liar di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur kuota perdagangan satwa liar untuk kebutuhan ekspor dan impor (Himawan, 2012).. Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam berdasarkan data dan informasi ilmiah rekomendasi dari otoritas keilmuan (LIPI) yang berlaku untuk satu tahun. Kuota ini sebagai dasar dalam penerbitan izin tangkap/ambil yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kuota juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin edar, baik izin edar dalam negeri yang dikeluarkan oleh Balai KSDA maupun izin edar luar negeri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal PHKA (Himawan, 2012).

Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama ASEAN WEN meskipun ada beberapa program yang belum berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu pembentukan National Task Force ASEAN WEN dan peningkatan kepedulian masyarakat (Himawan, 2012). *Wildlife crime* di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya nilai ekonomi dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, sehingga banyak melibatkan masyarakat lokal/sekitar hutan sebagai pemburu. Perdagangan ilegal tersebut memicu eksploitasi tumbuhan dan satwa liar yang dapat berakibat pada kepunahan jenis, menurunnya keanekaragaman hayati dan daya dukung lingkungan.

Berbagai kajian juga telah menunjukkan bahwa berbagai regulasi tentang perdagangan satwa di Indonesia belum berjalan baik disebabkan faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan problem institusi (Purnamasari, 2018). Pengaturan satwa langka menurut konvensi CITES masih kurang kuat secara hukum dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perdagangan liar satwa langka, komitmen yang masih lemah bagi para pengusaha tumbuhan dan satwa liar untuk mendukung

program konservasi jenis tumbuhan dan satwa langka yang di perdagangan masih rendah (Fernando, 2015).

Beragamnya rezim lingkungan hidup juga membuat kesulitan dalam mengatur perdagangan satwa liar (Irjayani, 2016). Kesulitan bagi setiap rezim lingkungan hidup adalah bagaimana menerapkan permasalahan yang sifatnya global dan lintas batas dengan pengimplementasiannya yang bersifat nasional. Kedua, pola hubungan dalam sistem internasional dalam membahas permasalahan lingkungan hidup yang bersifat utara-selatan. Di mana negara-negara utara adalah negara maju dan selatan sebagian besar merupakan “negara berkembang” yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang berbeda dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan kepentingan dari negara selatan yang masih banyak bergantung pada sumber daya alamnya sebagai pemasukan utama devisanya (Suyastri, 2012).

Beberapa kendala antara lain terbatasnya sumber daya manusia untuk menjalankan program kerja konservasi satwa yang mana tidak bisa efektif menangani persoalan di kawasan yang luas (Batara, 2014). Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor juga perbedaan misi, perbedaan kapasitas, perbedaan daya dukung, serta kurangnya komunikasi dan informasi antara sektor (Wahono, 2016).

Kurangnya kesadaran masyarakat baik pecinta satwa, pemburu, warga sekitar wilayah konservasi serta pedagang membawa persoalan tersendiri dengan terus berjalannya perdagangan hewan liar (Budiman, 2014). Keterlibatan warga yang dalam perdagangan satwa liar tidak bisa semata disalahkan pada kurangnya kesadaran, tetapi harus dilihat dari problem kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah konservasi yang minim dan situasi permintaan konsumsi satwa dari dalam dan luar negeri yang tinggi. Peluang adanya pendapatan negara dalam perdagangan satwa liar juga mendorong pemerintah untuk melakukan komodifikasi atas hewan (Prawignyo & Ruhaeni, 2018).

Rantai ekonomi perdagangan satwa sendiri telah terbentang dari hulu sampai hilir. Kelompok di daerah hulu adalah para pemburu yang biasanya adalah masyarakat sekitar hutan (Waryono, 2001). Kelompok ini berada dalam kondisi rentan terhadap bujukan untuk menangkap satwa disebabkan keterbatasan pengetahuan dan perbedaan sosial ekonomi dengan masyarakat di luar hutan. Selanjutnya, kelompok perantara yakni para distributor yang memesan berbagai satwa liar. Terakhir, kelompok pemanfaatan hilir, yakni pedagang di perkotaan yang secara sembunyi-sembunyi menjual jenis satwa liar yang dilindungi baik untuk kalangan domestik maupun luar negeri.

Cara negara untuk memposisikan satwa liar sebagai “sumber daya hayati” yang digunakan untuk menopang kehidupan manusia semata juga telah meminggirkan peri kehidupan hewan. Negara bahkan mengatur pemanfaatan sumber daya hayati dibandingkan dengan menjamin peri kehidupan satwa liar sesuai dengan nalurnya. Ekosistem dipandang memiliki keunikan tertentu oleh negara yang bahkan dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi (Mangapu, 2017). Pemerintah sebenarnya juga telah mengatur pemanfaatan hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang semakin meminggirkan satwa liar dan ruang hidupnya. Akibatnya, habitat dan satwa dalam waktu yang bersamaan menjadi target komodifikasi.

Upaya sejak tahun 1970-an untuk menjadikan sumber daya hutan sebagai pendapatan negara merupakan titik awal komodifikasi satwa liar bersama dengan habitatnya (Abdullah, 2016). Melalui skema HPH dan ditambah dengan HTI (Hutan Tanaman Industri), hutan dan isinya dieksploitasi dengan fasilitasi negara untuk diubah peruntukannya menjadi perkebunan maupun komoditas lain (Siburian, 2004). Akibatnya, intensitas kerusakan habitat satwa liar menjadi rusak dan memicu interaksi antara binatang dan manusia.

Terbukanya hutan telah membuat adanya perburuan terhadap satwa liar untuk diperdagangkan dalam kondisi masih hidup maupun bagian tubuhnya. Rente ekonomi muncul dari proses eksploitasi habitat dan satwa liar tersebut. Rente ekonomi terus berjalan lewat berbagai cara yang melibatkan aparat, kelompok warga dan pemangku lainnya yang menyebabkan terus terpinggirkannya kehidupan satwa liar (Purnomo et al., 2015).

Kajian ini lebih jauh akan menggali bagaimana rente ekonomi yang muncul dari komodifikasi habitat dan satwa liar telah meminggirkan kesejahteraan hewan. Perdagangan satwa liar menjadi bagian dari rente ekonomi yang muncul sejak mulai dari eksploitasi ruang hidup hewan menyebabkan peri kehidupan hewan. Satwa liar yang habitatnya sudah dirusak dan diperdagangkan sudah tidak bisa hidup lagi sesuai dengan nalurnya. Usaha negara melalui proses penangkaran dan pembiakan sama sekali tidak menyelesaikan problem rente ekonomi yang menyebabkan terpinggirkannya kesejahteraan hewan. *Animal welfare* dalam kajian ini dimaknai lebih jauh dalam upaya menjamin hak hidup hewan liar secara utuh sesuai dengan naluri alamnya.

2. Tinjauan Teoritis

Kajian ini akan dibingkai dengan sudut pandang *animal welfare* untuk melihat bagaimana kehidupan satwa liar terpinggirkan bahkan dibiarkan menjadi komoditas yang diperdagangkan mulai sejak di habitatnya. Sudut pandang kesejahteraan hewan sendiri menjadi faktor moderasi dalam hubungan antara manusia dan binatang. Kesejahteraan hewan dengan prinsip ekonomi

neoliberal pada dasarnya saling bertolak belakang disebabkan *animal welfare* mendorong adanya perlakuan yang baik terhadap binatang. Meskipun, *animal welfare* sendiri terkadang dikooptasi untuk mengakomodasi produksi ternak skala besar (Gibson & Jackson, 2017). Kesejahteraan hewan hanya disimplifikasi menjadi perlunya perlakuan yang baik dalam perawatan binatang, sehingga dapat menopang proses operasi, produksi dan layanan olahan ternak (Gibson & Jackson, 2017).

Dalam memposisikan diri dengan binatang, para aktivis *animal welfare* berbeda pandangan dengan para pendukung “konservasi.” Menurut pandangan para aktivis konservasi, upaya menjaga lingkungan harus fokus pada upaya mempertahankan ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan, tujuan kesejahteraan hewan adalah mempertahankan kualitas hidup semua spesies, maka upaya *animal welfare* harus fokus menghentikan manusia dari melanggar batas spesies lainnya (Paquet & Darimont, 2010).

Cara pandang “konservasi” mainstream dianggap terlalu antroposentrik disebabkan pada akhirnya mengeksploitasi alam, demi kepentingan ekonomi. Akibatnya, dalam kesempatan yang bersamaan peri kehidupan hewan juga terancam. Cara pandang “konservasi” mainstream juga selalu memposisikan hewan bukan sesuai naluri alamnya, tetapi memandangnya sebagai sumber daya hayati yang sewaktu-waktu bisa dieksploitasi (Paquet & Darimont, 2010). Berbagai upaya pencadangan populasi hewan dan wilayah tinggalnya untuk keperluan pariwisata, taman berburu, olahraga, dan lain-lain sesungguhnya telah meminggirkan kesejahteraan binatang dengan menganggapnya sebagai komoditas yang “eksotis”. Pandangan konservasionis yang memandang bahwa hubungan manusia, hewan dan pelestarian alam bersifat utilitarian telah membawa dampak serius (Paquet & Darimont, 2010).

Upaya memposisikan hewan khususnya satwa liar benar-benar berada dalam keadaan mengkhawatirkan. Perlakuan terhadap hewan liar yang akan dibuat untuk berbagai produk diperlakukan dengan cara yang keji. Hewan-hewan liar dibunuh dengan penjagalan yang tanpa memperhatikan rasa sakit yang dirasakan oleh satwa. Hewan terkadang harus mengalami kerusakan anggota tubuh sebelum benar-benar mati sampai dengan diolah bagian tubuhnya. Kajian telah membuktikan berbagai penyiksaan luar biasa terjadi dalam usaha menjadikan hewan liar sebagai produk tertentu (Kasterine, Arbeid, O. Caillabet, & Natusch, 2012).

Tidak hanya cukup sampai di situ, kajian lain telah menggali bagaimana perlakuan yang buruk pada satwa liar yang diperdagangkan telah membawa gangguan antarspesies. Hal tersebut menjadi gangguan serius dari kesejahteraan hewan. Kajian telah membuktikan bagaimana stres dan penyakit hewan liar yang muncul akibat kandang sempit, pemberian makan tidak teratur dan

perlakuan buruk lain menyebabkan perdagangan satwa membawa vektor berbagai penyakit. Penyakit yang dibawa oleh satwa liar yang diperlakukan secara buruk membawa berbagai kasus penyebaran SARS yang menewaskan sedikitnya 774 orang di seluruh dunia, flu burung, flu babi, dan lain-lain (Baker et al., 2013).

Kajian lain justru telah menggali bahwa pada dasarnya terpinggirkannya kesejahteraan hewan terjadi disebabkan sejak awal penentuan daerah konservasi memang ingin memprivatisasikan binatang. Baik dari pengalaman di Amerika Utara, Selandia Baru, Jerman, Kanada, Afrika, dan lain-lain telah mendorong adanya kontrol negara atas satwa liar. Negara menentukan di mana satwa liar dapat hidup beserta batas-batas wilayahnya bahkan sampai dengan pengaturan jumlah populasi. Negara bahkan menjadi punya tertinggi dari rantai makanan dengan menghilangkan berbagai predator di alam liar, demi menjaga produksi peternakan skala luas (Geist, 1988). Satwa liar bahkan dijadikan sarana perburuan untuk keperluan olahraga sebagai hobi kalangan menengah atas, pemasok daging, serta pengendalian jumlah populasi.

Komodifikasi hewan menjadi bentuk interaksi negatif antara manusia dan binatang. Interaksi antara manusia dan satwa liar sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan dan lanskap habitat hewan. Kontrol negara untuk menciptakan batas-batas daerah konservasi hewan kenyataannya tidak berdampak pada berkurangnya interaksi satwa dan manusia dalam bentuk konflik. Proses kontrol terhadap ruang hidup hewan pada dasarnya tidak dibuat dengan memahami naluri satwa liar (Morzillo, Beurs, & Martin-Mikle, 2014). Akan tetapi, semata untuk memudahkan komodifikasi satwa itu sendiri.

Upaya memperdagangkan hewan liar untuk dijadikan peliharaan atau penangkaran bahkan sama sekali tidak memahami naluri binatang, sehingga kesejahteraan satwa terus dipinggirkan. Komodifikasi hewan liar justru menjadi bentuk penaklukan satu spesies terhadap spesies lain. Komodifikasi hewan liar bahkan kurang memperhatikan bahwa tidak semua binatang memiliki ikatan antropomorfik yang kuat dengan manusia. Sifat predator dari hewan tertentu yang tidak mungkin dihilangkan juga dapat memperparah perlakuan terhadap binatang liar. Hal tersebut telah memperlihatkan proses terpinggirkannya peri kehidupan satwa liar mulai dari habitatnya sampai dengan kala diperdagangkan (Warwick, 2014).

Kajian ini akan lebih jauh menggunakan *animal welfare* untuk melihat proses rente ekonomi yang muncul dari proses perdagangan satwa liar mulai dari mengkomodifikasikan habitat dan binatang. Kesejahteraan hewan tidak hanya terbatas pada perlakuan terhadap satwa liar, tapi lebih jauh bagaimana memposisikan binatang sebagai komoditas yang berarti meminggirkan peri kehidupannya. Proses komodifikasi hewan liar yang sudah dimulai semenjak adanya pengendalian

spesies lewat skema teritorialisasi hutan secara sepihak telah menunjukkan bagaimana negara tidak memperhatikan peri kehidupan satwa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *desk study* dengan melakukan penelusuran terhadap data-data sekunder mengenai perburuan dan perdagangan satwa liar di Indonesia yang terjadi diawali dengan penetapan kawasan konservasi secara sepihak oleh negara. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri laporan pemerintahan, laporan swadaya masyarakat, artikel jurnal, dan laporan penelitian berbagai organisasi yang terkait dengan topik yang dikaji. Penelitian *desk study* dipilih dengan kelebihan untuk mengelaborasi studi-studi terdahulu khususnya berusaha merekonstruksi kembali kajian sebelumnya untuk menunjukkan adanya elaborasi lain dari fenomena yang dikaji. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hutan Politik: Pintu Masuk Komodifikasi Hewan dan Pengendalian Spesies

Di Indonesia, pemerintah menggunakan tafsiran penetapan kawasan hutan sesuai dengan aturan kolonial. Otoritas negara atas tutupan hutan muncul sebagai bentuk klaim sepihak atas kawasan konservasi. Negara punya otoritas untuk membentuk kelembagaan hutan. Hutan negara menjadi bentuk kendali institusi formal atas sumber daya agraria dan spesies yang ada di dalamnya. Negara mulai mengawali teritorialisasi kawasan hutan semenjak era kolonial dan dilanjutkan pada masa Orde Baru (Peluso & Vandergeest, 2001). Negara membentuk definisi atas tutupan kawasan hutan dengan aturan dan manajemen ilmiahnya. Negara melanjutkan legitimasi budaya yang sudah ada semenjak masa kolonial untuk menetapkan tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya sebagai hutan negara. Hutan negara menjadi bentuk “hutan politik” yang muncul dari konstruksi kekuasaan, demi alasan ekstraksi sumber daya alam. Hutan tidak dipandang sebagai ekosistem, tetapi dilihat sebagai sumber daya alam yang dicadangkan untuk keperluan pemenuhan ekonomi negara.

Kontrol negara atas kawasan hutan dilakukan melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, kontrol lahan formal. Negara melakukan batas-batas kawasan hutan dengan penggolongan tertentu sesuai dengan kepentingan ekonomi-politik. Negara membentuk seperangkat aturan dan kelembagaan dengan berisikan petugas keamanan, rimbawan profesional untuk memfasilitasi hutan tetap terjaga

(Lukas & Peluso, 2019). Perhutani memainkan peranan penting dalam penguasaan hutan negara beserta pemanfaatannya sebagai “aset negara.”

Kedua, kontrol atas spesies, negara secara sepihak mengatur mobilitas berbagai spesies yang ada di dalam hutan serta mengklasifikasikan jenis-jenis makhluk hidup sesuai dengan pencadangan kebutuhan ekonomi. *Ketiga*, kontrol atas tenaga kerja yang melakukan berbagai kegiatan ekstraksi sumber daya alam di dalam hutan (Lukas & Peluso, 2019).

Kebijakan kehutanan menjadi sarana untuk mendefinisikan dan memonopoli spesies tertentu. Negara memetakan spesies-spesies mana yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki daya regenerasi yang rendah, sehingga perlu mengadakan berbagai pencadangan. Negara mengendalikan tenaga kerja untuk mengekstrak, menanam, dan mengelola hutan. Negara mendirikan hutan secara permanen sebagai zona pemanfaatan lahan di bawah kendali negara (Lukas & Peluso, 2019).

Habitat hewan liar sampai dikalkulasikan nilai ekonominya, demi kelancaran proyek pembangunan yang dilembagakan. Taman Nasional yang dibentuk untuk melakukan “pengawetan” satwa liar secara *in situ* pun tak lepas dari penetapan batas-batas ruang yang pemanfaatannya justru berdasar tafsir kepentingan ekonomi, bukannya koridor mobilitas hewan dan interaksi manusia dan binatang (Lukas & Peluso, 2019). Teritorialisasi dan pengendalian spesies yang diklaim sebagai “konservasi,” realitasnya semata pengkondisian satwa dan habitatnya untuk dieksploitasi sewaktu-waktu. Pengkondisian habitat dan hewan liar melalui “wilayah konservasi” justru memposisikan mereka sebagai sesuatu yang “eksotis” dan meningkatkan nilai ekonominya (Lukas & Peluso, 2019).

Hegemoni negara atas habitat hewan dan hutan tak lebih menjadikannya sebagai kandang yang terus dikontrol. Satwa liar tidak lagi leluasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai nalurinya disebabkan adanya batas-batas formal yang telah dibuat negara. Apabila satwa liar keluar dari batas formal yang dibuat oleh negara, maka mereka akan menghadapi konflik serius dengan manusia baik para perambah hutan maupun konsesi perkebunan besar (Peluso & Lund, 2011). Di dalam “kandang” yang sudah dikontrol secara kuat tersebut, satwa liar tidak dapat hidup mengikuti keseimbangan ekosistem disebabkan negara telah mengendalikan seluruh aspek kehidupannya.

Hutan negara telah membuat masalah serius bagi masyarakat yang memiliki interaksi dengan hutan. Setidaknya 40 juta orang yang tinggal di dalam kawasan hutan yang awalnya berstatus sebagai tanah adat dikriminalisasikan. Masyarakat yang memiliki ikatan dengan hutan harus berhadapan dalam situasi konflik dengan negara dan perusahaan besar. Menariknya, jumlah lahan

yang dialokasikan untuk konsesi kayu terkenal melebihi jumlah lahan di seluruh wilayah negara (Kelly & Peluso, 2015). Cabang-cabang kekuasaan negara memfasilitasi konversi hutan untuk peruntukan perkebunan besar dan pertambangan yang memperparah kondisi masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan pada akhirnya terjebak dalam belenggu kemiskinan, meskipun berbagai program yang diklaim sebagai “pemberdayaan” dilakukan.

Hingga kini banyak pemberian konsesi perkebunan dan pertambangan pula yang berada di dalam kawasan hutan. Tumpang tindih fungsi tersebut telah mengganggu peri kehidupan hewan di habitatnya. Meskipun kawasan hutan sudah berstatus sebagai “wilayah konservasi” kenyataannya kasus tumpangtindih dengan konsesi lain masih sering terjadi. Binatang liar yang berada di dalam hutan berisiko tinggi untuk disingkirkan sebab dipandang sebagai pengganggu bagi aktivitas perkebunan besar dan pertambangan.

Kondisi tersebut menyebabkan mereka terpaksa menjadi “perambah hutan” dengan memanfaatkan koridor dari konsesi perkebunan dan pertambangan. Mereka melakukan klaim atas tanah hutan negara yang telah diduduki oleh konsesi swasta (Pasha & Susanto, 2009). Koridor yang membelah hutan ini menjadi jalan bagi pengendalian spesies yang dilakukan oleh negara dan dimanfaatkan oleh para “perambah hutan” untuk ikut memanfaatkan spesies-spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Antoro, 2011).

Di Indonesia, pemburu satwa memang biasa tinggal di dekat kawasan hutan. Pemburu tidak hanya oknum warga, tetapi juga oknum polisi, militer dan asosiasi penembak lokal. Pemburu biasa bekerja dalam tim dalam melancarkan aksinya. Bagian tubuh satwa liar biasa dibagi di antara para pemburu. Sambil menunggu pengepul ataupun pembeli potensial, pemburu biasa menyembunyikan buruannya dalam berbagai bentuk pengawetan (Shepherd & Magnus, 2004). Para pemburu hanya akan memberikan buruannya hanya jika pembeli telah membayar penuh. Aparat tidak bisa menangkap para pemburu di desanya disebabkan warga menganggap kebiasaan berburu sebagai hal biasa. Penduduk desa pemburu akan saling membela siapa pun yang akan memasuki wilayahnya. Di daerah yang penegakan hukumnya minim bahkan bagian tubuh satwa biasa diperdagangkan di toko-toko.

Keterlibatan oknum aparat polisi dan militer juga sering terjadi dalam penggunaan hasil buruan. Mereka membeli kulit harimau sebagai hadiah bagi perwira atasannya dengan harapan akan mudah naik jabatan (Shepherd & Magnus, 2004). Studi telah menunjukkan bagaimana keterlibatan militer dalam “konservasi” di kawasan hutan memiliki hegemoni yang kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamini adanya tindak gratifikasi berupa barang dari satwa

liar kepada para perwira. Akan tetapi, KPK hanya bisa menindak gratifikasi tersebut hanya jika nilai barang memiliki nominal 1 miliar dan melibatkan pejabat negara (Taufik, 2018).

Kontrol militer atas sumber daya dan orang-orang di dalamnya terjadi lewat adanya komando teritorial. Pengelolaan kawasan “konservasi” bagi militer sendiri dianggap sebagai bagian dari fungsi pertahanan, meskipun risiko pemanfaatan sumber daya di dalamnya untuk kepentingan bisnis militer lebih kerap terjadi (Peluso, 1993). Keterlibatan militer dalam pengelolaan kawasan hutan justru memperburuk konflik sumber daya yang terjadi di dalam dan sekitar wilayah konservasi. Cara-cara yang bersifat paksaan dan bermuatan kekerasan sering mereka pergunakan dalam konflik-konflik sumber daya di dalam “wilayah konservasi.” Struktur kontrol dan sarana kekerasan memperparah kondisi eksploitasi habitat hewan dan satwa yang dilakukan oleh tangan-tangan negara (Peluso, 1993). Berbagai kasus telah menunjukkan bagaimana keterlibatan aparat keamanan telah memperparah pemposisian satwa liar sebagai komoditas.

Tabel 1. Data Kasus Keterlibatan Aparat dalam Perdagangan Hewan Liar Secara Ilegal

No	Tahun	Pelaku	Kasus
1	2009	Oknum Militer	Perdagangan Bagian Tubuh Gajah (Anonim, 2009).
2	2014	Oknum Militer	Penyelundupan Burung Nuri Hitam (Hernawan, 2014).
3	2012-2016	Oknum Tentara dan Oknum Polisi	Penyimpanan satwa langka dan melindungi perlindungan hewan liar secara ilegal (Anonim, 2016)
4	2017	Oknum Militer	Perburuan penyu (ProFauna, 2017).
5	2018	Oknum Polisi	Perburuan Rusa Timor (David, 2018)
6	2018	Oknum Polisi dan Oknum Militer	Pemeliharaan satwa langka (Karakoro, 2018)
7	2018	Oknum Militer	Perdagangan bagian tubuh satwa langka (Siregar, 2018).
8	2018	Oknum Polisi	Penyelundupan trenggiling (Anonim, 2018).
9	2019	Oknum Militer	Penyelundupan Orangutan (Kurniawansyah, 2019).
10	2020	Oknum Polisi	Penyelundupan satwa langka (Sianturi, 2020).

Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber.

Pengendalian spesies semakin meningkatkan harga jual dari satwa liar, sehingga justru menambah permintaannya di pasarannya. Semakin langka satwa liar, harga jual mulai dari semenjak perburuan sampai dengan pengepul dan pasar hewan makin mahal. Umur dari satwa liar

juga menentukan harga dari satwa yang diperdagangkan (International Primate Protection League, 2012). Dari pemburu hewan-hewan liar akan langsung dibawa oleh pengepul untuk diperjualbelikan di “pasar.” Satwa-satwa yang disalurkan biasanya menyesuaikan dengan spesies yang dipesan oleh pembeli, sehingga jalur penyalurannya pun berbeda-beda.

Rente Ekonomi dari Komodifikasi Satwa Liar

Perburuan liar telah menjadi pemasok utama ke pasar dalam perdagangan satwa. Hewan liar yang didapat melalui perburuan banyak diperdagangkan disebabkan harganya yang murah dan kondisi satwa yang sehat. Menariknya, perdagangan hewan liar tidak terjadi di pasar binatang pada umumnya, tetapi lebih banyak diperjualbelikan di pasar burung. Temuan dari ProFauna telah menggali beberapa metode penjualan satwa liar (ProFauna, 2009).

Pertama, transaksi secara terbuka. Pada transaksi model ini, pedagang memperdagangkan hewan dengan stok yang telah mereka miliki dan ditampilkan di depan pelanggan. Satwa liar yang “dilindungi” ditampilkan pula langsung di hadapan konsumen. Model transaksi seperti ini biasanya dilakukan di kota kecil yang jarang dilakukan operasi penyitaan oleh aparat keamanan (ProFauna, 2009).

Kedua, transaksi tertutup. Metode seperti ini dilakukan untuk memperjualbelikan satwa langka. Metode tersebut digunakan dalam transaksi di kota besar seperti Pasar Pramuka di Jakarta yang kerap menjadi lokasi operasi penyitaan oleh aparat. Pedagang biasanya akan menyembunyikan satwa liar yang “dilindungi” di rumah-rumah dekat pasar burung ataupun kediaman penjual sendiri (ProFauna, 2009).

Ketiga, metode menggunakan perantara. Cara ini dipilih apabila hewan liar yang diperdagangkan masuk dalam kategori terancam punah dan dilindungi oleh hukum dan terkait pula dengan sindikat perdagangan internasional. Pembeli akan menanyakan pada penjual mengenai status hewan yang dijual. Hewan-hewan liar hanya akan ditunjukkan pada pembeli potensial yang telah diidentifikasi dulu oleh pedagang. Perantara menjadi penghubung transaksi antara penjual dan pembeli (ProFauna, 2009).

Keempat, metode barter, Pembeli harus menukarkan satwa liar tertentu untuk ditukarkan dengan binatang lain yang akan dia beli. Setiap spesies yang “dilindungi” kemudian ditentukan dengan harga di pasaran dan pembeli harus memberi lebih banyak uang untuk mendapatkan spesies yang diinginkan (ProFauna, 2009). Temuan dari ProFauna menunjukkan bahwa pasar burung menjadi pusat perdagangan satwa liar di Jawa. Dari 33 spesies target yang diperdagangkan di pasar burung sebanyak 25 ekor (75%) dikategorikan dilindungi oleh hukum.

Pasar hewan liar semakin berkembang dengan adanya transaksi secara daring. Transaksi daring menjadi metode lain yang dipakai oleh pedagang dalam memperjualbelikan satwa liar untuk menghindari operasi penyitaan yang dilakukan aparat. Peningkatan perdagangan satwa liar terus terjadi secara daring tiap tahun. Para pedagang memperdagangkan hewan liar melalui sistem COD (*Cash on Delivery*) (Mangunjaya et al., 2017).

Para pedagang membuat akun palsu dan mem-*posting* promosi penjualan satwa liar melalui media sosial. Konsumen dapat melihat satwa liar yang diperdagangkan bersama dengan harganya. Apabila dicapai kesepakatan harga, maka konsumen akan melakukan transfer uang (Mangunjaya et al., 2017). Penjual biasanya juga akan mem-*posting* nomor rekening yang ditujukan untuk transfer pembelian hewan. Terkadang penjual juga membuat akun rekening bersama yang dikelola pihak ketiga untuk mewadahi transfer uang dari pembeli (Gomez, Shepherd, & Morgan, 2019).

Semakin cepat pembayaran melalui rekening bersama tersebut, makin cepat pula hewan liar dikirim kepada konsumen. Adanya rekening bersama yang dikelola pihak ketiga juga menjadi metode untuk menghindari pemeriksaan dari aparat. Rekening bersama membantuk menyembunyikan transaksi, sehingga menyulitkan aparat untuk menjadikannya sebagai bukti di pengadilan (Gomez et al., 2019). Setelah ditransfer, kurir akan mengirimkan satwa liar yang sudah dibeli oleh konsumen.

Kurir menjadi aktor penting dalam perdagangan satwa liar secara daring. Perdagangan secara daring membuat antara penjual dan pembeli tidak perlu berkontak, sehingga mengubah proses jual-beli yang terjadi (Budiani & Raharningrum, 2018). Proses negosiasi dalam penjualan dalam skema ini dibantu oleh kurir. Pedagang merekrut kurir untuk mengidentifikasi calon pembeli satwa liar.

Kurir telah menjadi bisnis baru dalam sindikat perdagangan satwa liar. Kurir menawarkan jasa angkutan hewan liar untuk dikirim kepada pembeli. Data ProFauna mengidentifikasi bahwa kebanyakan kurir adalah mantan pedagang hewan. Para mantan pedagang hewan beralih menjadi kurir mengingat keuntungan besar yang akan didapat. Keberadaan kurir membantu kerahasiaan identitas pembeli dari kemungkinan operasi dari aparat (Budiani & Raharningrum, 2018).

Dalam perdagangan secara daring, pedagang bekerjasama dengan oknum pejabat pula untuk membuat berbagai administrasi palsu untuk melegitimasi penjualan satwa tertentu. Pembeli dapat meminta pedagang untuk mengurus berbagai kelengkapan dokumen dari hewan sebelum diterima konsumen (Budiani & Raharningrum, 2018). Jasa pengurusan legalitas satwa liar yang diperdagangkan tersebut juga memainkan peran penting dari kurir. Meskipun, permintaan

kelengkapan dokumen tidak umum dalam perdagangan secara daring. Pedagang pun dapat membatalkan perdagangan, apabila pengurusan dokumen dilihat memberatkan.

Transaksi secara daring juga dilakukan dengan interaksi di grup-grup media sosial. Para pembeli akan berinteraksi dengan penjual melalui grup sosial media maupun fitur *messenger*. Kebanyakan pembeli yang berinteraksi di dalam grup-grup sosial media perdagangan satwa liar pada dasarnya menjadi pasar disebabkan adanya hobi untuk memelihara binatang “eksotis.” Data World Wide Fund menunjukkan kebanyakan hewan liar yang dijual melalui sosial media terkonsentrasi dari Jawa. Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi lokasi terbesar penjual satwa liar melalui sosial media (Herdyanto, 2019).

Data ProFauna menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2018 perkembangan jual-beli satwa liar melalui sosial media mengalami fluktuasi. Tahun 2015 ditemukan 22 akun Facebook dan 7 grup aktif yang memperdagangkan satwa liar. Tahun 2016 terdapat 31 akun Facebook dan 16 grup. Tahun 2017 makin berkembang menjadi 46 akun dan 20 grup aktif. Penjualan melalui akun Instagram pada tahun 2017 muncul sebanyak 11 *user* (Anonim, 2019).

Tahun 2018 jumlah menurun menjadi 28 akun Facebook dan 4 grup aktif akibat adanya proses pemeriksaan aparat, tetapi ada pertambahan penjualan melalui Instagram sebanyak 28 *user*. Aktivitas perdagangan juga berkembang melalui penawaran di *timeline* sosial media maupun status akun palsu yang dibuat penjual satwa liar dengan men-*tag* sejumlah *user* jaringannya. Akun jaringan ini sebenarnya berasal dari grup jual beli yang telah berubah format (Anonim, 2019). Satu individu satwa bisa saja dipasarkan oleh lebih dari satu akun Facebook kepada sejumlah grup jual-beli.

Perdagangan hewan liar secara daring juga dilakukan pula dengan cara konsumen memakai modus kelompok masyarakat/klub penyayang binatang. Komodifikasi hewan liar telah mencapai pada proses yang mengkhawatirkan, kala dalih proses perawatan binatang telah menjadi modus dari perdagangannya pula. Kelompok “penyayang binatang” tersebut justru menjadi sasaran baru bagi para pedagang untuk melanjutkan bisnis perdagangan satwa liar (Mangunjaya et al., 2017).

Banyak oknum yang tidak pantas menjadi lembaga konservasi dengan mudah dapat membeli satwa liar yang “dilindungi.” Para kolektor hewan liar bahkan seringkali mempertukarkan binatang antara sesama mereka maupun dengan pedagang untuk mendapatkan satwa lain yang ingin dikoleksi. Berbagai perusahaan dengan mudah mendapatkan akses untuk membeli dan memelihara satwa-satwa yang “dilindungi” negara (ProFauna, 2013). Satwa-satwa liar itu bahkan dapat dipertontonkan pada setiap pengunjung yang datang di perusahaan/pabrik. Meskipun, perusahaan-perusahaan tidak memiliki izin lembaga konservasi.

Hewan-hewan liar yang diperdagangkan pada umumnya tidak diperlakukan dengan baik. Sayangnya, aparat sendiri kurang peduli dengan pentingnya perlakuan yang baik pada hewan liar yang diperdagangkan. Temuan dari ProFauna menemukan bahwa satwa liar yang diperdagangkan biasa diperlakukan dengan buruk menyebabkan terkadang binatang dalam kondisi dehidrasi, bulu kusam, kurus, dan lain-lain (ProFauna, 2013).

Satwa liar biasa dipelihara dalam kandang secara berdesak-desakan. Kandang yang dimiliki pedagang pun biasanya kotor dan jarang dibersihkan. Hal ini telah menunjukkan baik aparat maupun pedagang sesungguhnya tidak peduli dengan pentingnya menjamin peri kehidupan hewan. Padahal, hewan liar sendiri sudah mengalami penderitaan disebabkan telah tercerabut dari habitatnya (ProFauna, 2013).

Kenyataannya kebanyakan satwa liar yang diperdagangkan masih berusia muda. Pedagang tampaknya kurang memperdulikan usia dari hewan dan langsung membeli dari pemburu setiap ada pasokan binatang liar. Satwa liar yang diperdagangkan dalam usia dewasa sangat sulit ditemukan di pasaran. Komodifikasi hewan liar benar-benar telah menyiksa binatang dengan memisahkannya dari induknya (Nijman et al., 2019).

Pemburu menjual binatang liar pada pedagang sesuai dengan satwa yang didapat tanpa peduli hubungan antara induk dan anaknya. Mayoritas mamalia yang diperdagangkan masih sangat muda dan seharusnya masih menyusui pada induknya. Beberapa satwa yang diperdagangkan bahkan belum dapat membuka mata mereka, karena berusia sangat muda (Nijman et al., 2019).

Hewan liar diperdagangkan melalui metode lain dengan menjual olahan makanan ataupun bagian tubuhnya untuk dikonsumsi. Besarnya permintaan dari dalam negeri maupun pasar internasional untuk menjadikan bagian tubuh satwa liar sebagai aksesoris, *fashion*, obat-obatan dan kuliner telah mendorong adanya modus perdagangannya. Hewan liar bahkan diibaratkan seperti pohon kelapa yang semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan (ProFauna, 2012).

Negara sendiri terkesan abai dan justru memuluskan praktik komodifikasi hewan liar dibandingkan menjamin peri kehidupan binatang. Negara menetapkan sistem kuota untuk panen dan ekspor berbagai spesies yang “tidak dilindungi” untuk memasok pasar domestik dan internasional. Negara sendiri dalam menentukan kuota dan klasifikasi spesies yang akan diperdagangkan mengacu pada ketentuan CITES (Nijman & Shepherd, 2009).

Meskipun, realitasnya penilaian mengenai aspek keberlanjutan populasi dan keseimbangan ekosistem jarang dilakukan di Indonesia. Negara hanya mengatur kuota satwa yang “dilindungi” dari proses penangkaran dan pembiakan serta mengatur proses pelaporan pembiakan tiap bulan. Keturunan generasi kedua satwa dari hasil penangkaran dapat diperdagangkan tanpa kuota. Untuk

satwa yang didapat dari alam, negara menentukan sistem kuota panen dan ekspor tahunan. Kuota untuk spesies yang tercantum dalam Lampiran CITES ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu otoritas ilmiah CITES bertanggung jawab di tingkat nasional. Indonesia juga menetapkan kuota untuk spesies yang tidak terdaftar dalam CITES (Janssen & Blanken, 2016).

Akan tetapi, realitasnya pengambilan binatang liar dari alam melebihi kuota yang telah ditetapkan. Temuan dari Traffic menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki izin pembiakan dan penangkaran satwa, kenyataannya tetap bergantung pada perburuan binatang liar untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Perusahaan pun membeli satwa liar yang masih muda untuk diperdagangkan melalui ekspor (Nijman & Shepherd, 2009). Satwa liar yang didapat melalui perburuan untuk keperluan ekspor sulit dideteksi disebabkan didapat dari wilayah terpencil. Murahannya biaya dari hasil buruan mendorong perusahaan penangkaran memilih mengambil dari para pemburu (Janssen & Blanken, 2016).

Desa-desa sekitar habitat hewan liar atau wilayah konservasi telah menjadi pemasok bagi perusahaan penangkaran dalam memperjualbelikan satwa. Rantai perdagangan telah terbentuk antara desa “pemburu” dengan perusahaan penangkaran. Para pemburu yang ada di desa sekitar hutan akan menangkap satwa memberikannya pada pengepul dan akan langsung disalurkan di perusahaan penangkaran. Satwa yang sudah dikirimkan ke perusahaan akan menghadapi penyesuaian dan pembuatan dokumen yang dipalsukan untuk menunjukkan bahwa binatang yang akan diperjualbelikan tersebut benar-benar berasal dari penangkaran. Rantai perdagangan antara desa pemburu dengan perusahaan penangkaran telah menyebabkan penurunan serius jumlah populasi satwa yang diburu di habitatnya (Lyons & Natusch, 2011).

Negara pengimpor satwa liar dari Indonesia pada dasarnya kesulitan mengidentifikasi apakah binatang yang diperdagangkan berasal dari perburuan di habitatnya atau didapat melalui pembiakan dan penangkaran. Temuan dari Traffic menunjukkan bahwa pembiakan kenyataannya tidak mencukupi bahkan pembibitan sama sekali tidak diatur. Mahalnya biaya, staf penangkaran yang tidak cakap dan waktu lama pembiakan mendorong proses penangkaran untuk tujuan komersial tidak berjalan sukses (Nijman & Shepherd, 2009). Berbagai modus penipuan dengan bantuan oknum pejabat dilakukan untuk menyediakan dokumen yang dapat memberikan hewan dari tangkapan alam berstatus dari penangkaran. Perusahaan tak segan memakai jalan penyelundupan, agar kegiatan ekspor dapat tetap berjalan.

Metode perdagangan satwa lain yang muncul di Indonesia adalah dengan keterlibatan lembaga konservasi *ex-situ*. Berbagai lembaga yang telah memiliki izin konservasi *ex-situ* kenyataannya

beberapa kali justru terlibat dalam proses komodifikasi satwa liar. Alih-alih menjamin kehidupan hewan liar yang sudah tercerabut dari habitatnya, berbagai kasus menunjukkan bagaimana lembaga konservasi justru memperparah pengkondisian satwa sebagai komoditas.

Tabel 2. Data Kasus Keterlibatan Lembaga Konservasi dalam Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal.

No	Tahun	Pelaku	Kasus
1	2009	Oknum Pegawai Taman Safari Indonesia (TSI), Kebun binatang Pematang Siantar dan Kebun Binatang Bandung (KBB).	Jual-beli satwa langka (ProFauna, 2016).
2	2012	<i>Batang Dolphin Center.</i>	Perdagangan lumba-lumba (Silalahi, 2019).
2	2013	Kebun Binatang Ragunan dan Kebun Binatang Surabaya.	Barter satwa menjadi modus jual-beli hewan langka (Yasa, 2013).
3	2016	Oknum Kebun Binatang (KB) Mangkang di Semarang.	Jual-beli satwa langka (ProFauna, 2016).
4	2016	Oknum pegawai dan pengusaha mitra Kebun Binatang Bandung	Jual-beli hewan yang sudah diawetkan tanpa izin (Guci, 2016b)
5	2016	Oknum pegawai dan pengusaha mitra Taman Satwa Cikembulan Garut.	Jual-beli hewan yang sudah diawetkan tanpa izin (Guci, 2016a).
6	2019	Taman Safari Indonesia (TSI).	Keterlibatan jual-beli satwa liar melalui metode pemutihan (Silalahi, 2019).

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber.

5. Kesimpulan Dan Implikasi Kebijakan

Kajian ini telah mendalami bagaimana kompleksitas peminggiran kehidupan hewan liar dengan menjadikannya sebagai komoditas semenjak berada di habitatnya. Langkah negara untuk melakukan teritorialisasi hutan yang bermotif kepentingan ekonomi benar-benar telah menyebabkan konflik sumber daya serius antara negara, masyarakat dan spesies lain yang ada di dalam hutan. Warga dan hewan liar menjadi pihak yang paling dirugikan dari proses teritorialisasi hutan.

Hewan liar menghadapi kontrol legal dan pengendalian spesies yang menyebabkan mereka seperti hidup dalam kandang yang sewaktu-waktu dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi negara. Warga sekitar hutan yang miskin pada akhirnya menjadi perambah hutan dan pemburu yang memanfaatkan nilai ekonomi satwa liar. Aparat keamanan seperti militer dan kepolisian

sebagai bagian dari tangan negara ikut pula dalam mengeksploitasi nilai ekonomi hewan liar yang dikonstruksikan oleh negara. Akibatnya hewan liar menghadapi ancaman serius dalam hidupnya di habitat disebabkan menghadapi perburuan yang dilakukan oleh manusia. Rantai makanan telah menjadi rente ekonomi di mana akumulasi kapital telah menjadi puncak tertinggi dari proses “makan dan dimakan.”

Proses komodifikasi hewan liar yang diawali dengan perburuan liar dilanjutkan dengan berbagai metode perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Semua proses rente ekonomi ini benar-benar telah memperburuk perlakuan terhadap hewan liar dan superioritas satu spesies terhadap spesies lain. Modus pertama dari rente ekonomi hewan liar adalah adanya transaksi terbuka antara pedagang dan pembeli. *Kedua*, transaksi secara tertutup dengan melakukan transaksi di tempat tertentu yang disepakati. *Ketiga*, transaksi melalui perantara, di mana dilakukan proses identifikasi terhadap pembeli potensial.

Keempat, metode barter di mana pembeli akan menukarkan satwa tertentu dan memberikan sejumlah uang atau barang untuk membeli satwa yang diinginkan. *Kelima*, transaksi secara daring dengan memanfaatkan sosial media dan peran kurir dalam menghubungkan penjual-pembeli. Selanjutnya, modus perdagangan dengan pelibatan komunitas atau organisasi pecinta satwa. Modus lain adalah perusahaan penangkaran yang melakukan pemutihan status hewan buruan untuk keperluan ekspor ke luar negeri. Terakhir, keterlibatan kebun binatang maupun lembaga konservasi dalam pemutihan status buruan hewan liar menjadi status penangkaran sebagai penitipan hewan yang akan diperjualbelikan. Satwa yang diperdagangkan berada dalam kondisi yang menderita disebabkan berdesak-desakan di kandang sempit dan jarang dibersihkan. Satwa liar juga harus menghadapi masalah terpisahnya induk dan anaknya akibat binatang yang berusia muda lebih banyak diperjualbelikan.

Untuk menyelesaikan problem komodifikasi yang telah mengancam kehidupan satwa liar, maka diperlukan langkah untuk menghentikan proses rente ekonomi semenjak di habitatnya. Cara pandang yang digunakan negara untuk mengatur fungsi habitat semata untuk keperluan “pembangunan ekonomi” perlu diganti dengan sudut pandang keselarasan interaksi antarspesies. Kehidupan satwa yang ada di habitatnya perlu dijamin oleh negara. Penghentian terhadap ekspansi konsesi perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan harus dihentikan. Selain itu, masyarakat yang telah kehilangan akses atas hutannya perlu diberikan hak-haknya kembali untuk memanfaatkan hutan tanpa harus menjadi perambah dan pemburu di dalam hutan. Negara harus mampu melihat bahwa satwa-satwa liar yang ada di dalam hutan pada dasarnya adalah indikator

keberlangsungan alam, maka otoritas harus mampu menjamin keselarasan antarspesies dapat terjamin bukannya mengabaikan serta terlibat dalam proses komodifikasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus NO.644/PID.SUS/PN.JMB). *Legalitas*, 8(2), 48–72.
- Anonim. (2009). Oknum TNI Pemburu Gading Gajah Ditangkap. Retrieved February 3, 2020, from <https://tekno.kompas.com/read/2009/01/27/18132871/oknum.tni.pemburu.gading.gajah.ditangkap>
- Anonim. (2016). Oknum Aparat Diduga Terlibat Perdagangan Satwa. Retrieved February 1, 2020, from <https://www.matamatanews.com/oknum-aparat-diduga-terlibat-perdagangan-satwa>
- Anonim. (2018). Perburuan Satwa Ilegal Ujung Kulon Libatkan Oknum Pamen Polri. Retrieved February 1, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204210301-12-351155/perburuan-satwa-ilegal-ujung-kulon-libatkan-oknum-pamen-polri>
- Anonim. (2019). Profauna Soroti Maraknya Perdagangan Satwa Liar di Facebook. Retrieved February 4, 2020, from <https://kumparan.com/bandungkiwari/profauna-soroti-maraknya-perdagangan-satwa-liar-di-facebook-1r7xtio06ey>
- Antoro, T. D. (2011). Perambahasan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). *Mimbar Hukum*, 23(3), 431–645.
- Baker, S. E., Cain, R., Kesteren, F. van, Zommers, Z. A., D'Cruze, N., & Macdonald, D. W. (2013). Rough Trade: Animal Welfare in the Global Wildlife Trade. *BioScience*, 63(12), 928–938.
- Batara, K. M. (2014). *Eksistensi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional*. Universitas Hasanuddin.
- Budiani, I., & Raharningrum, F. (2018). *Illegal Online Trade In Indonesian Parrots*. Geneva. Retrieved from <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/TGIATOC-ParrotsTrade-A4-Web.pdf>
- Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema*, 26(48), 1372–1380.
- David. (2018). Anggota Terlibat Perburuan Liar Di Ujung Kulon, Kapolri Diminta Tegas. Retrieved February 1, 2020, from <https://faktabanten.co.id/blog/2018/12/04/anggota-terlibat-perburuan-liar-di-ujung-kulon-kapolri-diminta-tegas/>
- Fernando, D. (2015). *Pengaturan Perlindungan Satwa Langka Menurut Konvensi Cites Dan Implementasinya Di Indonesia*. Universitas Bung Hatta.

- Geist, V. (1988). How Markets in Wildlife Meat and Parts, and the Sale of Hunting Privileges, Jeopardize Wildlife Conservation. *Conservation Biology*, 2(1), 15–26.
- Gibson, T. J., & Jackson, E. L. (2017). The economics of animal welfare. *Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz*, 36(1), 125–135.
- Gomez, L., Shepherd, C. R., & Morgan, J. (2019). Revealing the online trade of Sun Bears in Indonesia. *Traffic Bulletin*, 31(2), 67–71.
- Guci, T. M. (2016a). Banyak Satwa Langka Kebun Binatang Dijual, Begini Reaksi BBKSDA Jabar. Retrieved February 5, 2020, from <https://www.tribunnews.com/regional/2016/11/01/banyak-satwa-langka-kebun-binatang-dijual-begini-reaksi-bbk-sda-jabar>
- Guci, T. M. (2016b). Pengusaha AS Dapatkan Satwa Mati dari Kebun Binatang Bandung. Retrieved February 5, 2020, from <https://www.tribunnews.com/regional/2016/11/01/pengusaha-as-dapatkan-satwa-mati-dari-kebun-binatang-bandung>
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2(2), 29–48.
- Herdyanto, A. (2019). Semakin Langka Makin Mahal: 10 Fakta Perdagangan Satwa Liar Kian Marak. Retrieved February 4, 2020, from <https://www.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/perdagangan-satwa-dilindungi-makin-marak-di-indonesia/full>
- Hernawan, A. (2014). BBKP Surabaya sita nuri kepala hitam dari oknum TNI. Retrieved February 1, 2020, from <https://www.lensaIndonesia.com/2014/09/30/bb-kp-surabaya-sita-nuri-kepala-hitam-dari-oknum-tni.html>
- Himawan, S. (2012). *Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)*. Universitas Diponegoro.
- International Primate Protection League. (2012). *Perdagangan Primata Di Palembang, Sumatera Selatan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.profauna.net/sites/default/files/downloads/publikasi-2012-perdagangan-primata-di-palembang-sumatera-selatan.pdf>
- Irjayani, F. (2016). Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Flora And Fauna Oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*, 2(1), 197–203.
- Janssen, J., & Blanken, L. J. (2016). *Going Dutch An analysis of the import of live animals from Indonesia by the Netherlands*. Selangor. Retrieved from <https://www.traffic.org/site/assets/files/2334/indonesia-netherlands-live-animal-trade.pdf>
- Karokaro, A. S. (2018). Jangan Ada Lagi Orangutan yang Dipelihara! Retrieved February 2, 2020, from <https://www.mongabay.co.id/2018/10/03/jangan-ada-lagi-orangutan-yang-dipelihara/>
- Kasterine, A., Arbeid, R., O. Caillabet, & Natusch, D. (2012). *The Trade in South-East Asian Python Skins*. Geneva. Retrieved from [http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/The Trade in Southeast Asian Python Skins for web.pdf](http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/The%20Trade%20in%20Southeast%20Asian%20Python%20Skins%20for%20web.pdf)

- Kellya, A. B., & Peluso, N. L. (2015). Frontiers of Commodification: State Lands and Their Formalization. *Society & Natural Resources: An International Journal*, 28(5), 473–495.
- Kurniawansyah, R. (2019). Pelaku Penyelundupan Orang Utan Diduga Oknum TNI. Retrieved February 2, 2020, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/243587-pelaku-penyelundupan-orang-utan-diduga-oknum-tni>
- Lukas, M. C., & Peluso, N. L. (2019). Transforming the Classic Political Forest: Contentious Territories in Java. *Antipode*, 1(1), 1–25.
- Lyons, J. A., & Natusch, D. J. D. (2011). Wildlife laundering through breeding farms: Illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (*Morelia viridis*) from Indonesia. *Biological Conservation*, 1–9.
- Mangapu, A. M. P. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1990. *Lex Privatum*, 5(7), 91–98.
- Mangunjaya, F. M., Prabowo, H. S., Tobing, I. S., Abbas, A. S., Saleh, C., Sunarto, ... Mulyana, T. M. (2017). *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI NO 4, 2014 Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta. Retrieved from https://d2d2fb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/buku_pelestarian_satwa_untuk_keseimbangan_ekosistem.pdf
- Morzillo, A. T., Beurs, K. M. de, & Martin-Mikle, C. J. (2014). A conceptual framework to evaluate human-wildlife interactions within coupled human and natural systems. *Ecology and Society*, 19(3), 43–54.
- Nijman, V., Ardiansyah, A., Bergin, D., Birot, H., Brown, E., Langgeng, A., ... Nekaris, K. A.-I. (2019). Dynamics of illegal wildlife trade in Indonesian markets over two decades, illustrated by trade in Sunda Leopard Cats. *Biodiversity*, 1=14.
- Nijman, V., & Shepherd, C. R. (2009). *Wildlife Trade From ASEAN To The EU: Issues With The Trade In Captive-Bred Reptiles From Indonesia*. Brussel, Belgia. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/233726944_Wildlife_trade_from_ASEAN_to_the_EU_Issues_with_the_trade_in_captive-bred_reptiles_from_Indonesia
- Paquet, P., & Darimont, C. (2010). Wildlife conservation and animal welfare: two sides of the same coin? *Animal Welfare*, 19(2), 177–190.
- Pasha, R., & Susanto, A. (2009). Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Hutan Dengan Pola Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(2), 82–94.
- Peluso, N. L. (1993). Coercing conservation? The politics of state resource control. *Global Environment Change*, 199–217.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812.

- Prawignyo, K. A., & Ruhaeni, N. (2018). Pengaturan Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) dan Implementasinya di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 4(2), 852–856.
- ProFauna. (2009). *Wildlife Trade Survey On The Bird Markets In Java*. Jakarta. Retrieved from <http://worldanimal.net/documents/final-report-bird-market-survey-2009.pdf>
- ProFauna. (2012). Perdagangan Satwa Liar dan Bagian-bagiannya Semakin Tak Terkendali. *Suara Satwa*, 16(3), 1–32.
- ProFauna. (2013). Edukasi di Ketapang Kalimantan Barat untuk Mengurangi Konflik Orangutan dan Sawit. *Suara Satwa*, 17(1), 2–3.
- ProFauna. (2016). Ternyata Pegawai Kebun Binatang Ini Malah Terlibat Dalam Perdagangan Satwa Langka. Retrieved February 5, 2020, from <https://www.profauna.net/id/content/ternyata-pegawai-kebun-binatang-ini-malah-terlibat-dalam-perdagangan-satwa-langka#.XkFdQCMxXIV>
- ProFauna. (2017). PROFAUNA Mendesak Diusut Tuntas Perburuan Penyu di Halmahera Selatan Oleh Oknum Berseragam Doreng. Retrieved February 1, 2020, from <https://www.profauna.net/id/content/profauna-mendesak-diusut-tuntas-perburuan-penyu-di-halmahera-selatan-oleh-oknum-berseragam#.XkFAASMxXIU>
- Purnamasari, A. I. (2018). *Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar Di DKI Jakarta*. Universitas Terbuka.
- Purnomo, H., Shantiko, B., Gunawan, H., Sitorus, S., Salim, M. A., & Achdiawan, R. (2015). Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan: Sebuah pendekatan analitis. In *diskusi terbatas “Mencegah Kebakaran Lahan dan Hutan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarana Wana Jaya* (pp. 1–14).
- Shepherd, C. R., & Magnus, N. (2004). *Nowhere To Hide: The Trade In Sumatran Tiger*. Selangor.
- Sianturi, A. (2020). Oknum Polisi Terlibat Penjualan Satwa Dilindungi. Retrieved February 3, 2020, from <https://www.beritasatu.com/nasional/595422/oknum-polisi-terlibat-penjualan-satwa-dilindungi>
- Siburian, R. (2004). Kebijakan Kehutanan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 6(1), 121–136.
- Silalahi, M. (2019). Jejak Transaksi di Taman Safari. Retrieved February 5, 2020, from <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/157438/jejak-transaksi-di-taman-safari>
- Siregar, W. A. (2018). Oknum TNI Diamankan karena Menjual Offset Harimau Sumatera. Retrieved February 2, 2020, from <https://news.okezone.com/read/2018/01/23/340/1848932/oknum-tni-diamankan-karena-menjual-offset-harimau-sumatera>
- Suyastri, C. (2012). Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES. *Jurnal Transnasional*, 4(1), 790–808.
- Taufik, R. (2018). KPK temukan Modus Baru Suap dengan Satwa Langka Dilindungi. Retrieved February 2, 2020, from <https://www.ngopibareng.id/timeline/kpk-temukan-modus-baru-suap-dengan-satwa-langka-dilindungi-393840>

- Wahono, R. (2016). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) Dalam Pengendalian Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Warwick, C. (2014). The Morality of the Reptile “Pet” Trade. *Journal of Animal Ethics*, 4(1), 74–94.
- Waryono, T. (2001). Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Di Propinsi Dki Jakarta. In *Seminar Nasional Strategi dan Aplikasi Pemberdayaan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta*, (pp. 1–9).
- Yasa, R. M. (2013). Kebun Binatang Jual Hewan Langka. Retrieved February 10, 2020, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/04/0952092/Kebun.Binatang.Jual.Hewan.Langka>